

**PENGARUH BEBAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DAN KOTA-KOTA SE PROVINSI RIAU**

R. Erfan Sufriady. Ms<sup>1)</sup>

Amir Hasan<sup>2)</sup>

Enni Savitri<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau

<sup>2),3)</sup> Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

**Abstract.** *To be able to achieve the goals set out in the Regional Budget, each regional expenditure (BD) must be used for productive activities. With the rapid development of development sourced from the allocation of capital expenditure, it is expected that there will be an increase in regional independence in financing its activities, especially in financial matters. In addition, development must also pay attention to the quality of its human resources. Therefore this study aims to determine the Effect of Regional Expenditures on Regional Original Revenue and the Human Development Index of Cities and Cities in Riau Province.*

*This research was designed as explanasi research to explain the effect of regional expenditure on regional original income and human development index of City and City Regencies in Riau Province. With a sample size of 84 samples (7 years multiplied by 12 regencies and cities). The data used in this study is secondary data in the form of APBD Realization Reports obtained from the website of the Director General of Financial Balance through [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) and Human Development Index (HDI) data obtained from BPS Catalog: 4102002 via [www.bps.go .id](http://www.bps.go.id). Whereas for analyzing data, the SPSS 17.00 program was used with path analysis.*

*The results of the study indicate that there is an influence of regional expenditure on regional original income and the human development index, and there is an influence of regional income on the human development index. Therefore the government must pay more attention to the use of regional expenditure, so that it is more effective and in accordance with the targets set, so that local revenue and the human development index can be increased.*

**Keywords:** *Regional Expenditures, Regional Original Revenue, Human Development Index*

## **PENDAHULUAN**

Sasaran pembangunan ekonomi tidak lagi berorientasi pada pendapatan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Dalam hal ini pembangunan manusia dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia, yang diupayakan dapat berperan dalam proses pembangunan

sehingga akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut bukan hanya kewajiban bagi pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh komponen masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran untuk dapat membangun potensi daerahnya.

Pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran, mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan berupa Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Rencana strategis daerah (Renstrada) kedua dokumen tersebut merupakan acuan rencana 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam kerangka tahunan. Anggaran yang dikeluarkan suatu daerah setiap tahunnya, merupakan suatu rencana kegiatan dan pembiayaan penye-lenggaraan tugas-tugas pemerin-tahan dan pembangunan daerah otonom dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Oleh karena itu APBD harus selalu di awasi dalam

penyusunan dan pelaksanaannya. sehingga tujuan-tujuan penetapan APBD dapat tercapai dengan maksimal.

Untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam APBD, maka setiap belanja daerah (BD) harus digunakan untuk kegiatan yang produktif. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah yang tersusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan hasil yang direncanakan melalui program dan kegiatan. (Puji Lestari, 2016)

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khusus-nya dalam pemberian pelayanan umum.

Berdasarkan pada pengertian tentang belanja daerah, maka dapat dilihat bahwa penggunaan belanja daerah haruslah dikelola dengan maksimal. Agar pembangunan yang ada disuatu daerah dapat tercapai dengan maksimal. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Belanja tak langsung dan Belanja langsung.

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah infra-struktur dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang kegiatan per-ekonomian suatu daerah. Sehingga akan memberikan dampak terhadap penerimaan daerah, dari sektor pajak, retribusi, maupun sektor lainnya.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004:73). Belanja modal merupakan salah satu belanja pemerintah yang menjadi perhatian khusus pemerintah seperti yang diungkapkan oleh staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan,

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali

PAD akan mem-pengaruhi perkembangan dan pem-bangunan daerah tersebut. Dalam kontribusinya terhadap APBD dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu untuk meng-alokasikan setiap potensi keuangan yang dimiliki, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada pening-katan penerimaan pemerintah daerah.

Penyerapan belanja daerah berbeda di setiap Kabupaten/Kota. Selain itu, penggunaan belanja daerah yang dimiliki dari setiap daerah juga belum maksimal. Akibatnya masih banyak belanja daerah yang tidak dibelanjakan (silva). Dengan adanya dana menu-mpuk di kas daerah ini, maka pemba-nguan yang ada di suatu daerah tersebut tidak akan maksimal. Seperti kurangnya pengembangan infrastruktur pendidikan, infrastruktur sarana transportasi dan lain-lainnya. Pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan potensi daerahnya.

Pendapatan asli daerah yang ada di setiap kabupaten dan kota yang ada di provinsi Riau berfluktuasi setiap tahunnya. Hal itu juga terjadi pada belanja daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Melihat pendapatan dan belanja daerah yang cenderung ber-variasi tersebut, maka terkadang akan terdapat perbedaan

antara pendapatan dan belanja yang dianggarkan dengan pendapatan dan belanja daerah yang terealisasi.

Akibat dari kurang efektifnya pengalokasian dana yang ada di kas daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, maka akan berdampak pada pembangunan daerah. Salah satu sector pembangunan yang akan terhambat dengan adanya masalah pengalokasian belanja daerah ini adalah pembangunan di bidang manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah merupakan penggunaan sumberdaya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (Abdullah, 2015)

Salah satu tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Karena salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam membangun suatu wilayah adalah dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*.

Pembangunan manusia diartikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini terungkap dalam publikasi *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Human Development Report* tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia ini mengutamakan adanya empat unsur diantaranya produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor kesehatan, pendidikan dan pendapatan. IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator dasar, yaitu: usia, ilmu yang dimiliki, dan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berpengaruh satu sama lain.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya.

Secara keseluruhan tingkat indeks pembangunan manusia Provinsi Riau sudah berada di atas indeks pembangunan manusia Indonesia. Namun, masih ada kabupaten dan kota yang mendapatkan predikat pembangunan manusia di bawah indeks pembangunan manusia di Indonesia. Seperti pada tahun 2010 rata-rata indeks pembangunan manusia Indonesia adalah 66.53, hanya Kabupaten Kampar (68.62), Kabupaten Siak (69.29), Kabupaten Bengkalis (77.34), Kota Pekanbaru (69.55) dan Kota Dumai (69.78), yang mendapatkan indeks pembangunan manusia di atas rata-rata nasional.

Untuk itu, guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, maka diperlukan peranan dari berbagai aspek masyarakat, terutama dari pemerintah. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan adanya masalah sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta masih belum maksimal, maka dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengembangkan penelitian dari peneliti terdahulu, seperti: Syukriy Abdullah dan Afrah Junita (2015), menunjukkan bahwa Pendapatan Sendiri berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan *Budget ratcheting* memoderasi hubungan di antara keduanya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Ryanda (2014) menyatakan bahwa adanya

pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penambahan variabel indeks pembangunan manusia (IPM). Pembangunan indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada pengalokasian Belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur penunjang, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sementara itu variabel pendapatan asli daerah sebagai perantara (intervening), karena pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemandirian keuangan dari suatu daerah, semakin baik sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, maka akan semakin meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Retribusi dan pajak tentu saja mencerminkan tingkat pembangunan manusia (dari segi pendapatan atau ekonomi). Oleh karena itu semakin baik pendapatan daerah, maka akan semakin baik pula pembangunan manusianya.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan variabel Pendapatan belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimediasi oleh variabel belanja daerah. Adapun judul penelitian ini adalah: **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dan Kota Kota Se Provinsi Riau.**

#### PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang

ingin diteliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dimediasi oleh pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia dimediasi oleh pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.

#### **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - 1) Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan

indeks pembangunan manusia Kabupaten Dan Kota Kota Se Provinsi Riau. Terutama untuk sektor pengembangan sumber daya manusia. Seperti Pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

- 2) Dalam bidang metode penelitian, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Dengan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti untuk dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti di bidang keuangan daerah, khususnya mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Dan Kota Kota Se Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga memperdalam pengetahuan peneliti di sektor pembangunan kualitas hidup manusia yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- 2) Bagi Instansi Pemerintahan, maka dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Riau. Khususnya bagi masing-masing Kabupaten/Kota.

## TELAAH PUSTAKA

### 1. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo dalam Fauzi (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut P. Ardhani (2011) Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mahmudi (2016:134) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan

daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak padabelanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah (D. N. Yulia Astiti, 2016)

### 2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak padabelanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah (D. N. Yulia Astiti, 2016)

Asumsi yang digunakan dalam *Teori Human Capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Subandi, 2014: 93).

### 3. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap indeks Pembangunan Manusia

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak padabelanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah (D. N. Yulia Astiti, 2016)

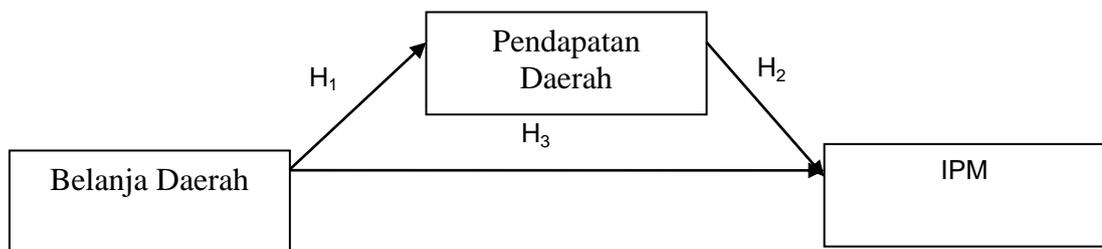
PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh

pendapatan asli daerah terhadap APBD. PAD diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### KERANGKA PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada landasan teori dan rumusan masalah, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar:

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian



Sumber: Lilis Setyowati, 2012, dan Syukriy Abdullah, dan Afrah Junita, 2015

### HIPOTESIS

Dengan melihat gambaran secara umum berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diajukan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
2. Terdapat pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia dimediasi oleh pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
3. Terdapat pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.

### METODE PENELITIAN

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanasi* untuk menjelaskan pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Dan Kota Kota Se Provinsi Riau. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok bahasan tersebut, penelitian ini berangkat dari kajian *empiric* dan *teoritis* yang menjadi acuan peneliti dalam menjelaskan hubungan *kausalitas* antar variabel penelitian. Obyek penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan melalui [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### **Populasi dan Sampel**

Adapun populasi pada penelitian pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, dari tahun 2010 sampai 2016 (lima tahun). yaitu sebanyak 84 data. Dikarenakan pada jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan *metode sensus*, yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Adapun sampel pada penelitian pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, dari tahun 2010 sampai 2016 (lima tahun), yaitu sebanyak 84 data.

### **Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan melalui [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Katalog BPS: 4102002 melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Data sekunder adalah data-data berupa dokumen, catatan-catatan statistik dan laporan-laporan dari pengumpulan oleh suatu instansi dalam bentuk publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga.

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data tersebut merupakan data dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dari tahun 2010 s.d 2016.

### **Teknik Pengumpulan Data**

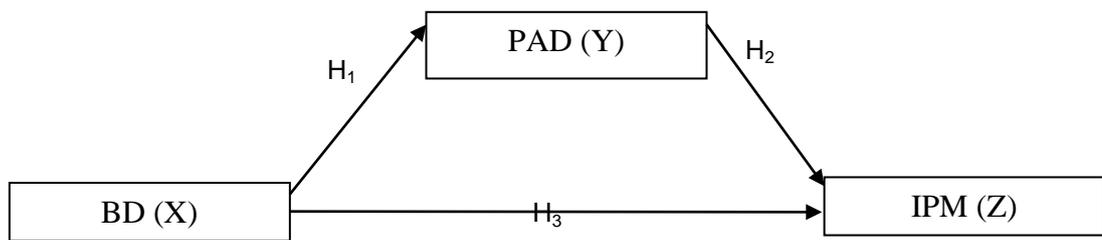
Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non perilaku dan dokumentasi. Metode observasi non perilaku merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari karya ilmiah berupa jurnal, disertasi, buku-buku. Serta dokumen-dokumen berupa Anggaran dan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Katalog BPS: 4102002.

Sedangkan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan data lain yang mendukung berupa buku data dan informasi, laporan keuangan daerah publikasi, dokumen, makalah, artikel dan lain-lain.

### **Teknik Analisa Data**

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan model *Analisis Regresi Linear* dan pengolahan data menggunakan program SPSS (*Statistical Package for The Social Sciences*). Dengan model Berikut ini: (Trisnadi Wijaya, 2015)

Gambar: 3.1. Model Penelitian



Sumber: Lilis Setyowati, 2012, dan Syukriy Abdullah, dan Afrah Junita, 2015

Adapun model persamaan regresi yang dapat diperoleh dalam analisis ini adalah:

$$\text{Persamaan I: } Z = \alpha + c_1X + bY + \varepsilon$$

$$\text{Persamaan II: } Y = \alpha + c_1X + \varepsilon$$

Keterangan:

X = PAD

Y = Belanja Daerah

Z = IPM

$\varepsilon$  = Faktor Lain

**a. Uji Signifikansi simultan (uji statistik F)**

Uji signifikansi simultan ini digunakan untuk Mengetahui seberapa besar variabel independen (X dan M) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Analisis uji f dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Namun sebelum membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan  $(1-\alpha)$  dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) =  $n - (k+1)$  agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai Alpa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0, 05. Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p\ value < \alpha$  maka dikatakan signifikan. Sebaliknya  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p\ value > \alpha$  maka dikatakan tidak signifikan.

**b. Uji T**

Untuk menentukan koefisien spesifikasi yang mana tidak sama dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan Uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel eksogen secara individual dalam menerangkan variasi variabel endogen (Ghozali, 2014: 58). Caranya adalah dengan membagikan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung  $\geq$  t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, namun jika t hitung  $\leq$  t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (Ghozali,2014:58).

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh secara individu variabel belanja daerah dan pendapatan asli daerah. terhadap indeks pembangunan manusia

$H_a$  = Terdapat pengaruh secara individu variabel variabel belanja daerah dan pendapatan asli daerah. terhadap indeks pembangunan manusia.

Sementara itu untuk hipotesis persamaan ke dua adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah

$H_a$  = Terdapat pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah

**c. Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (Y) terhadap perubahan variabel dependen (X). Untuk menguji keamatan hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Menurut Ghozali (2008) uji koefisien determinasi yang digunakan

adalah nilai adjusted  $R^2$  yang merupakan nilai  $R^2$  yang telah disesuaikan. Adjusted  $R^2$  merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen kedalam persamaan. Keberartian pengaruh dimaksudkan untuk mengetahui berarti atau tidaknya pengaruh X dan Y dengan menggunakan harga  $R^2$  akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2: Tingkat Koefisien Determinasi dan Kekuatan Pengaruh Besar Nilai**

Besar Nilai	Pengaruh
$r^2 = 0\%$	Tidak Berpengaruh
$0\% \leq r^2 < 4\%$	Berpengaruh Rendah Sekali
$4\% \leq r^2 < 16\%$	Berpengaruh Rendah
$16\% \leq r^2 < 36\%$	Berpengaruh Sedang
$36\% \leq r^2 < 64\%$	Berpengaruh Tinggi
$r^2 \geq 64\%$	Berpengaruh Tinggi Sekali

Sumber: Sugiyono (2006;112)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen (predictor/Y) terhadap perubahan variabel independen (X). Untuk menguji keamatan hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka dilakukan dengan cara nilai koefisien korelasi (r).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis di atas, maka dapat disusun persamaan struktur baru, yaitu sebagai berikut:

$$Z = 1.089 X + 0.794 Y + 0.4347$$

$$Y = 0.401 X + 0.682$$

1. Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut:  $t_{hitung} (11.325) > t_{tabel} (1.989)$

dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $1.089^2 = 357\%$ . Menunjukkan pengaruh yang kuat dari belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut:  $t_{hitung} (5.864) > t_{tabel} (1.989)$  dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis penelitian ini diterima, Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $0.794^2 = 63\%$ . Menunjukkan pengaruh yang kuat dari pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut:  $t_{hitung} (6.188) > t_{tabel} (1.989)$  dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Artinya Belanja daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $0.401^2 = 16\%$ . Menunjukkan pengaruh yang lemah dari belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan tentang pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $1.089^2 = 357\%$ . Menunjukkan pengaruh yang kuat dari belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $0.794^2 = 63\%$ . Menunjukkan pengaruh

yang kuat dari pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Belanja daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar  $0.401^2 = 16\%$ . Menunjukkan pengaruh yang lemah dari belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah terkait penggunaan belanja daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan daerah adalah:
  - 1) Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar bisa benar-benar terserap oleh masyarakat guna meningkatkan IPM daerah tersebut.
  - 2) Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya bagi anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk memajukan pembangunan daerah. Kemudian mengoptimalkan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta melakukan kontrol atau pengendalian dalam penyaluran anggaran publik tersebut agar benar-benar sampai ke sasaran program dan sasaran pembangunan.
  2. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah terkait Pendapatan Asli suatu daerah

dalam meningkatkan indeks pembangunan daerah adalah:

- 1) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal memposkan anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan kota dibanding anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah.
- 2) Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik seperti rumah sakit dan gedung sekolah serta sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dengan demikian, maka pemerintah harus mampu untuk mengoptimalkan setiap belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti:
  - 1) Belanja daerah harus dipergunakan untuk sector-sector yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti, belanja infrastruktur, pembangunan jalan ke daerah destinasi pariwisata, pengembangan sector unggulan setiap kabupaten dan kota.
  - 2) Setiap penggunaan belanja daerah harus selalu diawasi penggunaannya, sehingga benar-benar mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi: 1) waktu penggunaan, 2) jumlah belanja daerah yang digunakan, 3) evaluasi hasil pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaky. 2007. *Intermediate Accounting*. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Ferdinand Agusty, 2006, *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2008. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: penerbit BP Undip
- Gondodiyoto, Santoyo. 2007. *Audit Sistem Informasi + Pendekatan*

- CobIT. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi seri bunga rampai Manajemen keuangan Daerah: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Hamzah, Tanjung, 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Bandung. CV. Utomo.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutapea dan Thoha. 2008. *Keuangan Negara*. Edisi 5. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Bandung.
- Mahsun, M., Firma S dan Heribertus A.P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo.2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Maryono dan Patmi Istiana. 2008. *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1*. Bogor: Yudhistira
- \_\_\_\_\_. Vol. XI. No. 4. Oktober 2019
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty
- Nurmansyah, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Unilak Press, Pekanbaru.
- Rai, I G.A. 2011. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renjowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi non laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rochman, Ganie. 2000, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta
- Spencer, J., dan Spencer, M., 2007. *Standards for Internal Control in New York State Government*.
- Salam, Moeljono. 2009. *Good Governance Culture*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Subandi, MM. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarmanto. 2009. *Keuangan Negara*. Edisi 5. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung, Alfabeta
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Suprpto. 2002. *Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Globalisasi*. Jakarta: LAN.

- Sutrisno Edy, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Umar, Sekaran. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wibowo, 2014, *Manajemen Kinerja*, Edisi Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perilaku dalam Organsiasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irwan, D. 2011. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat". (tesis). Universitas Gajahmada.